

PERSEPSI STAKEHOLDERS UNTUK PEMBANGUNAN EKOWISATA DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO

(Stakeholders Perception for Ecotourism Development in Tesso Nilo National Park)

LA ODE SABIR¹⁾, RICKY AVENZORA²⁾ DAN GUNARDI DJOKO WINARNO³⁾

¹⁾Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan IPB

²⁾Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, IPB

³⁾Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lampung

Email: laode.sabir@gmail.com

Diterima 27 November 2017 / Disetujui 03 Februari 2018

ABSTRACT

The increasing issue of occupational land conflict in Tesso Nilo National Park (TNTN) should be addressed objectively by various stakeholders. One of the important things that can be done to support these efforts is to conduct careful and thorough research on the orientation of stakeholders for the implementation of ecotourism development in TNTN. The stakeholders focussed on this research consist of eight groups of respondents, namely land claiming communities, landowners, landless communities, TNTN centers, local government, forestry services, private companies and non-governmental organizations. Data collected then analyzed by using One Score One Criteria System. The result of this study indicates that stakeholder perceptions related to various aspects of the TNTN development concept are "somewhat good" (score 5). This provides an interpretation that TNTN's development concept is "somewhat effective and efficient" to be implemented in the development of forest ecosystems in TNTN.

Keywords: ecotourism, stakeholders, TNTN

ABSTRAK

Meningkatnya isu konflik okupasi lahan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) seharusnya disikapi secara obyektif oleh berbagai pihak terkait. Salah satu hal penting yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah dengan melakukan penelitian yang cermat dan teliti mengenai orientasi *stakeholders* untuk penyelenggaraan pembangunan ekowisata di TNTN. Adapun *stakeholders* yang menjadi fokus penelitian terdiri atas delapan kelompok responden yaitu masyarakat pengklaim lahan di dalam kawasan, masyarakat pemilik lahan di luar kawasan, masyarakat yang tidak memiliki lahan, Balai TNTN, Pemerintah desa, Dinas Kehutanan, Perusahaan Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Data dianalisis menggunakan metode *One Score One Criteria System*. Hasil penelitian persepsi *stakeholders* tentang berbagai aspek dari konsep pengembangan TNTN adalah bermakna agak baik (skor 5). Hal ini memberikan makna bahwa konsep pengembangan TNTN adalah bernilai agak efektif dan efisien untuk diimplementasikan dalam pembangunan ekosistem hutan di TNTN.

Kata kunci: ekowisata, para pihak, TNTN

PENDAHULUAN

Konflik okupasi lahan di TNTN menjadi semakin kompleks bukan hanya terkait keberadaan harimau sumatera dan gajah sumatera sebagai satwa yang dilindungi, melainkan juga karena histori status dan penetapan kawasan taman nasional yang penuh dinamika "cacat hukum" sebagai akibat diberlakukannya *by power politic* dalam sektor kehutanan sejak beberapa dekade yang lalu. Apapun juga konflik tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut namun harus diselesaikan secara efisien dan efektif, sehingga isu orientasi parapihak menjadi penting untuk ditelusuri secara cermat dan teliti.

Dalam konteks sejarah, setidaknya ada 4 fase penting yang mewarnai konflik kepentingan satwa-manusia, sosial ekonomi dan ekologi di TNTN, yaitu: (1) **Fase 1970-an**. Konflik okupasi lahan di wilayah Hutan

Langgam pada dasarnya dapat dicermati sejak areal hutan ini ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan tujuan untuk menyuplai bahan baku industri *plywood* dan produksi kayu lainnya. Pada awalnya kebijakan ini telah memicu tingginya minat berinvestasi dari sektor swasta untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada areal hutan tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga pada dasarnya telah memicu tingginya penyerapan jumlah tenaga kerja baik yang berasal dari penduduk setempat maupun dari daerah sekitar, yang selanjutnya membentuk pemukiman baru di sekitar kawasan hutan; (2) **Fase 1980-an**. Seiring dengan tingginya dinamika pemanfaatan kayu dan penambahan jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat terhadap lahan ikut pula meningkat sehingga mengakibatkan perubahan ekosistem alami dalam skala luas, yang di dalamnya mencakup habitat dari berbagai spesies yang dilindungi.

Kompleksitas masalah yang terjadi di kelompok Hutan Tesso Nilo selanjutnya memicu berbagai kalangan yang peduli untuk menyelamatkan kondisi hidupan liar di kawasan hutan tersebut, di antaranya melalui upaya konservasi habitat spesies Gajah Sumatera dari ancaman kerusakan dan kepunahan; (3) **Fase 2000-an**. Pada tahun 2004, didorong oleh upaya untuk menyelamatkan habitat Gajah Sumatera, areal konsesi PT Inhutani IV ditunjuk sebagai Taman Nasional. Selanjutnya pada tahun 2009 diikuti pula dengan pencabutan izin konsesi PT Nanjak Makmur menjadi areal Taman Nasional dengan tujuan untuk mendukung upaya konservasi Gajah Sumatera; dan (4) **Fase 2010-an**. Pada tahun 2014 TNTN secara resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan konsekuensi untuk menyelenggarakan pembangunan sebagaimana telah diamankan oleh UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Berdasarkan data BTNTN (2016), potensi sumberdaya ekowisata di TNTN adalah beragam mulai dari flora (215 jenis dari 48 famili), fauna (23 jenis mamalia, 18 jenis di antaranya berstatus dilindungi dan 16 jenis termasuk rawan punah berdasarkan kriteria IUCN), potensi perairan dan bentang alam. Atas berbagai hal tersebut maka upaya mendasar dan penting untuk dilakukan oleh *stakeholders* adalah merumuskan rencana pengelolaan yang mampu mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya ekosistem hutan di TNTN secara detail dan terukur.

Mencermati situasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka penting untuk dilakukan upaya pemetaan orientasi *stakeholders* dalam rangka mewujudkan pembangunan ekowisata di TNTN. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis orientasi *stakeholders* untuk pembangunan ekowisata di TNTN.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2016 - Januari 2017 di TNTN, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu metode untuk mempelajari fenomena manusia dan perilaku sosialnya; peneliti mempelajari dan berusaha mengungkap makna apa dan mengapa fenomena terjadi yang bersumber dari partisipan (Altinay dan Paraskevas 2008). Adapun fenomena yang diteliti adalah orientasi *stakeholders* dalam pembangunan ekowisata di TNTN meliputi aspek persepsi *stakeholders* mengenai: (1) keabsahan lahan, (2) rencana baru pengelolaan, (3) distribusi manfaat ekologi, (4) distribusi manfaat budaya, dan (5) distribusi manfaat ekonomi. Hal ini sangat penting untuk mengetahui pandangan *stakeholders* mengenai pembangunan ekowisata di TNTN.

Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner tertutup (*close ended questioner*); setiap kriteria dinilai berdasarkan sistem skoring yang mengacu pada sistem

One Score One Criteria System (Avenzora 2008). Skala yang digunakan adalah 1-7 (pengembangan dari skala likert 1-5), sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang mengartikulasikan suatu nilai dengan sangat detail. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa responden merupakan kelompok sosial yang menerima/memberikan pengaruh dalam dinamika sistem pembangunan TNTN. Adapun responden yang diambil sebagai sampel dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) Pengelola TNTN (14 orang), (2) Masyarakat pengklaim lahan di dalam kawasan (30 orang), (3) masyarakat pemilik lahan di luar kawasan (30 orang), (4) masyarakat yang tidak memiliki lahan (30 orang), (5) Pemerintah Desa (16 orang), (6) Dinas Kehutanan Provinsi Riau (12 orang), (7) Perusahaan Swasta (14 orang), dan (8) LSM (10 orang) maka secara keseluruhan jumlah responden yaitu 156 orang.

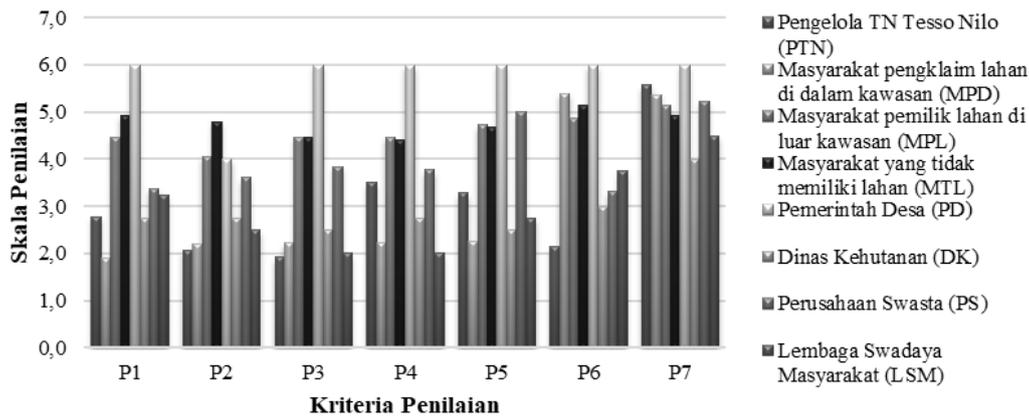
Untuk mengetahui signifikansi perbedaan polarisasi orientasi *stakeholders* berdasarkan skor yang didapat sebelumnya, maka data persepsi *stakeholders* diuji secara statistika *Kruskal-Wallis*. Hasil analisis akan menggambarkan fenomena polarisasi orientasi *stakeholders* dalam pembangunan ekowisata di TNTN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Stakeholders tentang Keabsahan Lahan

Adanya klaim penguasaan dan penggunaan lahan oleh masyarakat di wilayah TNTN memberikan makna bahwa aspek kepemilikan lahan secara legal di kawasan hutan adalah lebih dipentingkan daripada menilai aspek fungsi dan manfaatnya bagi kepentingan mereka. Suwarno dan Situmorang (2017) mengungkapkan bahwa rezim peraturan pengukuhan kawasan hutan yang ada saat ini cenderung dipandang dan digunakan sebagai instrumen pengukuhan hak (*property right*) atas kawasan hutan daripada sebagai instrumen penataan fungsi hutan. Adapun persepsi *stakeholders* tentang klaim keabsahan lahan masyarakat di dalam kawasan TNTN dapat dilihat pada Gambar 1.

Hasil penelitian persepsi *stakeholders* terhadap status keabsahan lahan yang di klaim oleh masyarakat di dalam kawasan TNTN menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara *stakeholders* terhadap keberadaan TNTN. Nilai ini memberikan makna bahwa status kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan TNTN adalah tidak mendapatkan pengakuan yang kuat di antara *stakeholders*. Hasil uji *Kruskal-Wallis* menunjukkan bahwa $p\text{-value} = 0,429 < \alpha = 5\%$ atau terima H_1 , yang artinya persepsi *stakeholders* terhadap keabsahan lahan adalah tidak sama atau terdapat perbedaan signifikan.



Keterangan:

- a. **Kriteria Penilaian:** **P1** = Masyarakat di dalam kawasan adalah sah karena memiliki Surat Keterangan Hak Pakai sesuai kesepakatan bersama; **P2** = Masyarakat di dalam kawasan adalah sah karena memiliki Surat Perjanjian Jual Beli antara Pihak Pembeli dengan Pihak Penjual yang disaksikan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan hukum jual beli; **P3** = Masyarakat di dalam kawasan adalah sah karena memiliki Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa; **P4** = Masyarakat di dalam kawasan adalah sah karena memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa; **P5** = Masyarakat di dalam kawasan adalah sah karena memiliki Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh BPN; **P6** = Masyarakat di dalam kawasan adalah sah karena memiliki Surat Izin Menggarap Lahan yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat; **P7** = Masyarakat di dalam kawasan adalah sah karena memiliki Izin Pemanfaatan Pariwisata Alam yang dikeluarkan oleh Pengelola TNTN.
- b. **Skala penilaian:** **1** = sangat tidak setuju, **2** = tidak setuju, **3** = agak tidak setuju, **4** = ragu-ragu, **5** = agak setuju, **6** = setuju, **7** = sangat setuju.

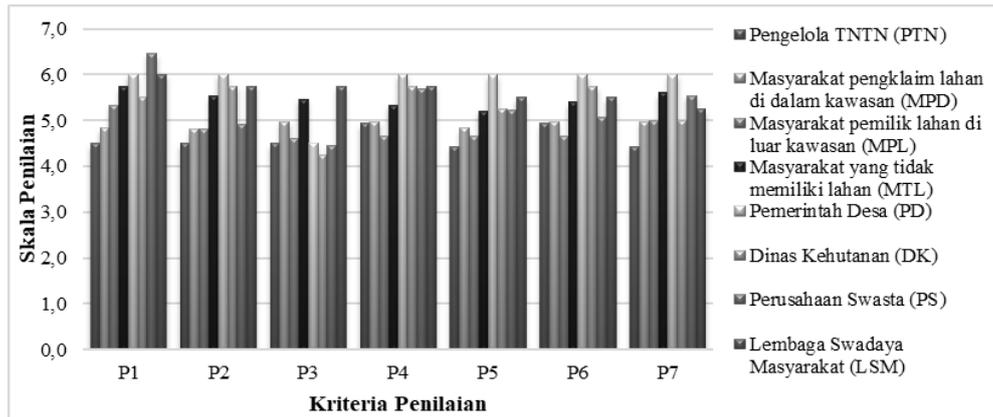
Gambar 1. Persepsi tentang keabsahan lahan

Masyarakat memandang bahwa berbagai bentuk “*lasgaevin*” atas pemanfaatan atau pengusahaan lahan di dalam kawasan TNTN adalah sah secara perdata dan telah dilandasi kesepakatan bersama oleh berbagai pihak. Di sisi lain, Balai TNTN dan WWF Indonesia Riau Program *Conservation* mengungkapkan bahwa terdapat dua fase perubahan sampai tahun 2010, yakni: *Pertama* pada TNTN SK. 255/Menhut - II/2004 dimana terdapat 6 kelompok yaitu Kelompok perambahan perbekalan, Bina Warga Sejahtera, Simpang Silau, Bagan Limau, Pondok Kempas dan Lancang Kuning. *Kedua*, TNTN SK. 663/Menhut - II/2009 dimana terdapat 8 kelompok antara lain: Koridor RAPP Ukui Gondai, Kuala Onangan Toro Jaya, Toro Makmur, Air Sawan 1, Air Sawan 2, Mamahan, Mandiri Indah KM 93/Simpang HPH PT Nanjak Makmur. Berdasarkan SK. 255/Menhut-II/2004 dan SK 663/Menhut-II/2009, Balai TNTN dan WWF Indonesia Riau Program *Conservation* melaporkan bahwa estimasi luas perambahan di TNTN adalah sebesar 95.485 Hektar. Yoserizal dan Alhamra (2016) memaparkan beberapa faktor penyebab terjadinya perambahan adalah: 1) adanya penyalahgunaan wewenang jabatan; 2) faktor ekonomi yang masih rendah; 3) pengaruh dari luar yang dibawa oleh pendatang; 4) faktor ketidak-adilan dalam tata kelola hutan dan; 5) ketidaktahuan masyarakat atas aturan hukum.

2. Persepsi Stakeholders tentang Rencana Baru Pengelolaan

Rencana baru pengelolaan TNTN adalah dikembangkan melalui pengaturan sistem zonasi berdasarkan pemanfaatan sumberdaya ekowisata di TNTN dalam satu rencana pengelolaan yang komprehensif dan terintegrasi. Berdasarkan Permenhut: P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, sistem zonasi adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas, dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Adapun persepsi stakeholders tentang rencana baru pengelolaan TNTN dapat dilihat pada Gambar 2.

Dalam berbagai kriteria terkait rencana baru pengelolaan, hasil penelitian menunjukkan skor rata-rata antara *stakeholders* adalah 5 (agak tinggi). Nilai ini membuktikan bahwa stakeholders memiliki persepsi yang mengarah pada proses pengaturan sistem zonasi yang berkelanjutan. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa $p\text{-value} = 0,429 < \alpha = 5\%$ atau terima H_1 , yang artinya persepsi *stakeholders* terhadap rencana baru pengelolaan TNTN adalah tidak sama atau terdapat perbedaan signifikan.



Keterangan

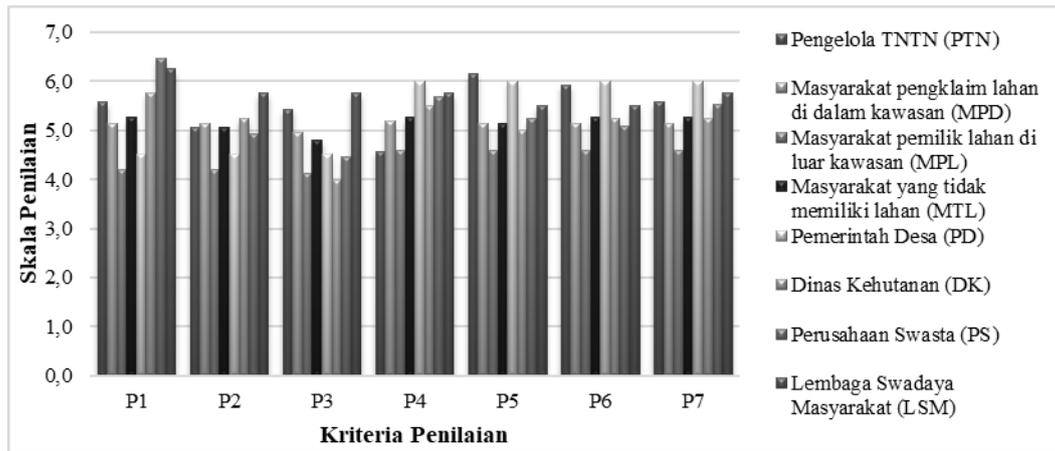
- a) **Kriteria Penilaian:** **P1** = Tapak lahan di dalam areal TN ditetapkan sebagai zona rimba yang ditujukan untuk mendukung keanekaragaman hayati pada zona inti serta mampu menunjang pendapatan ekonomi masyarakat melalui budidaya tanaman kehutanan; **P2** = Tapak lahan di dalam areal TN ditetapkan sebagai zona rimba yang ditujukan untuk mendukung keanekaragaman hayati pada zona inti serta mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan menunjang pendapatan ekonomi masyarakat melalui budidaya tanaman buah-buahan; **P3** = Tapak lahan di dalam areal TN ditetapkan sebagai zona pemanfaatan yang ditujukan untuk menunjang pendapatan ekonomi masyarakat melalui budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias; **P4** = Tapak lahan di dalam areal TN ditetapkan sebagai zona pemanfaatan yang ditujukan untuk menunjang pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wisata gajah; **P5** = Tapak lahan di dalam areal TN ditetapkan sebagai zona pemanfaatan yang ditujukan untuk menunjang pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wisata burung; **P6** = Tapak lahan di dalam areal TN ditetapkan sebagai zona pemanfaatan yang ditujukan untuk menunjang pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan *camping ground*; **P7** = Tapak lahan di dalam areal TN ditetapkan sebagai zona pemanfaatan yang ditujukan untuk menunjang pendapatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata.
- b) **Skala penilaian:** 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = agak tidak setuju, 4 = biasa saja, 5 = agak setuju, 6 = setuju, 7 = sangat setuju.

Gambar 2. Persepsi Stakeholders tentang rencana baru pengelolaan

Dalam pemantapan kawasan TNTN, sebaiknya penetapan zonasi diwujudkan secara hukum positif dan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Selain itu, adanya pengakuan masyarakat secara luas serta seluruh aktor yang terlibat; baik itu dari pihak Perusahaan Swasta, LSM dan Akademisi adalah salah satu faktor keberhasilan dalam meraih rencana baru pengelolaan dan pemantapan kawasan secara berkelanjutan. Desmiwati dan Surati (2017) mengingatkan, strategi kebijakan yang perlu dilakukan untuk pemantapan kawasan hutan adalah: 1) pemantapan kawasan TN harus diwujudkan baik secara yuridis formal maupun fisik di lapangan, serta adanya pengakuan masyarakat secara luas akan keberadaan kawasan tersebut; 2) mempercepat proses penetapan zonasi dalam pemantapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan TN terhadap pemanfaatan sumber daya hutan belum mencerminkan keberpihakan TN terhadap kepentingan masyarakat dan menafikan fakta bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan TN masih hidup dalam keadaan prasejahtera dan tertinggal. Oleh karena itu, masyarakat perlu terlibat aktif dalam pengelolaan TN, agar ekonomi masyarakat dapat meningkat dan relasi konfliktual mengenai tata batas antara masyarakat dengan pengelola TN dapat diminimalisir (Desmiwati dan Surati 2017).

3. Persepsi Stakeholders tentang Distribusi Manfaat Ekologi

Persepsi *stakeholders* tentang distribusi manfaat ekologi dalam pembangunan TNTN adalah dikembangkan berdasarkan konsep budidaya berbagai elemen sistem ekologi pada tapak lahan di dalam kawasan TNTN. Pada umumnya, masyarakat yang bermukim di sekitar TNTN sebagian besar bekerja di sektor pertanian diikuti dengan sektor perdagangan dan jasa. Dengan adanya invasi perkebunan sawit di dalam kawasan TNTN disertai masuknya kelompok masyarakat pendatang, maka implikasi yang terjadi adalah berubahnya mata pencaharian tradisional masyarakat lokal yang dulunya sangat bergantung pada hasil hutan. Pengelola TNTN mengungkapkan masyarakat sekitar TNTN sekarang ini menganggap perkebunan sawit yang menjadi sumber kehidupan mereka sehingga mereka berlomba-lomba mengganti hutan dengan kebun sawit (BTNTN 2015). Selain melakukan budidaya sawit, masyarakat juga melakukan pemanfaatan hasil hutan non kayu secara tradisional berupa pemanfaatan rotan, damar, getah, menangkap ikan dan pemanfaatan madu sialang sebagai komoditas utama (BTNTN 2015). Adapun persepsi *stakeholders* tentang distribusi manfaat ekologi dalam pembangunan TNTN dapat dilihat pada Gambar 3.



Keterangan:

- a) **Kriteria Penilaian:** **P1** = Tapak lahan di dalam areal TN dibudidayakan dengan jenis tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang tergolong tanaman asli lokal; **P2** = Tapak lahan di dalam areal TN dibudidayakan dengan jenis tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang tergolong tanaman dilindungi; **P3** = Tapak lahan di dalam areal TN dibudidayakan dengan jenis tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang tergolong sebagai sumber pakan satwa liar; **P4** = Tapak lahan di dalam areal TN dibudidayakan dengan jenis tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang mampu menyediakan kebutuhan hidup manusia; **P5** = Tapak lahan di dalam areal TN dibudidayakan dengan jenis tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang mampu menjaga stabilitas struktur dan komposisi tanah; **P6** = Tapak lahan di dalam areal TN dibudidayakan dengan jenis tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang mampu menjaga stabilitas iklim mikro di dalam kawasan; **P7** = Tapak lahan di dalam areal TN dibudidayakan dengan jenis tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang mampu menambah nilai estetika lahan di dalam kawasan.
- b) **Skala penilaian:** **1** = sangat tidak setuju, **2** = tidak setuju, **3** = agak tidak setuju, **4** = biasa saja, **5** = agak setuju, **6** = setuju, **7** = sangat setuju.

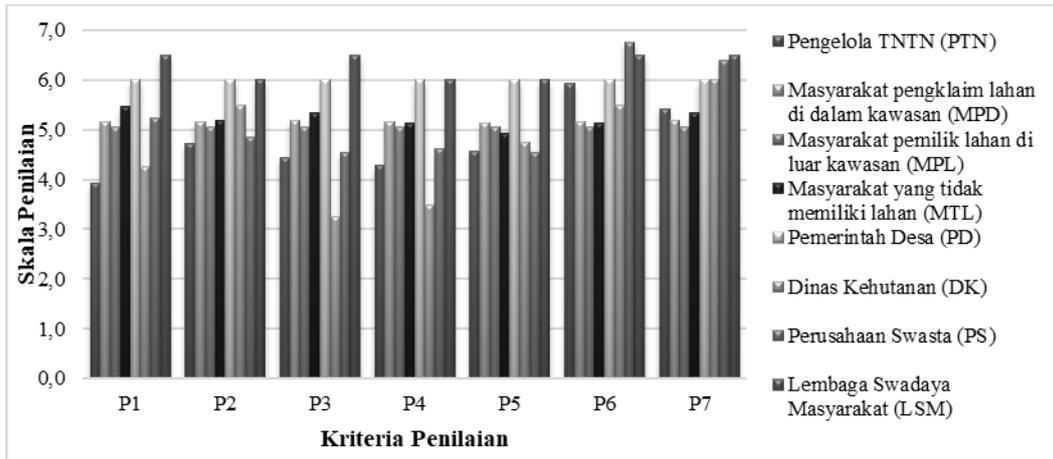
Gambar 3. Persepsi Stakeholders tentang distribusi manfaat ekologi

Dalam berbagai kriteria terkait distribusi manfaat ekologi, hasil penelitian membuktikan skor rata-rata antara stakeholders adalah 5 (agak tinggi). Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa $p\text{-value} = 0,429 < \alpha=5\%$ atau terima H_1 , yang artinya persepsi stakeholders tentang distribusi manfaat ekologi dalam pembangunan TNTN adalah tidak sama atau terdapat perbedaan signifikan. Nilai ini membuktikan bahwa stakeholders memiliki persepsi yang mengarah pada pentingnya pengembangan berbagai elemen ekologis secara berkelanjutan. Selain itu, seluruh stakeholders bersedia untuk menata ulang kembali pemanfaatan lahan melalui berbagai skema budidaya tanaman pada tapak lahan TNTN untuk mewujudkan *ecological sustainability* dan berkeadilan dalam meraih distribusi manfaat. Wakka (2014) menyatakan kunci untuk penyelesaian masalah di TN adalah dilakukannya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Desmiwati dan Surati (2017) menguraikan kerjasama dalam pendataan potensi sumber daya hutan secara otentik memiliki peluang ketika perspektif pengelola TN bisa disatukan dengan pengetahuan lokal masyarakat. Namun yang perlu diberi catatan penting adalah mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar hutan

membutuhkan kemampuan khusus pada aspek komunikasi pembangunan masyarakat sekitar hutan dan pada aspek pengelolaan konflik (Desmiwati dan Surati 2017).

4. Persepsi Stakeholders tentang Distribusi Manfaat Budaya

Persepsi stakeholders tentang distribusi manfaat budaya adalah disusun dan dikembangkan dengan tujuan untuk menopang sistem budaya masyarakat lokal di sekitar TNTN. Secara umum, kondisi aktual pemanfaatan tapak lahan dan kegiatan budidaya tanaman pada TNTN dinilai mampu menopang kebutuhan bahan baku spesifik masyarakat lokal, baik untuk dimanfaatkan sebagai tanaman obat atau pun bahan bangunan rumah adat. Berdasarkan hasil penelitian LIPI (2003) dalam Kahfi (2015), setidaknya telah ditemukan 83 jenis tumbuhan obat dan 4 jenis tumbuhan untuk racun ikan di kawasan hutan TNTN. Jenis tumbuhan dan racun tersebut terdiri dari 87 jenis dan 78 marga yang termasuk 46 suku/famili untuk mengobati sekitar 38 macam penyakit. Adapun persepsi stakeholders tentang distribusi manfaat budaya dalam pembangunan TNTN dapat dilihat pada Gambar 4.



Keterangan:

- a) **Skala Penilaian: P1** = Kegiatan budidaya tanaman pada tapak lahan di dalam areal TN haruslah yang mampu menopang kebutuhan bahan baku spesifik dan menunjang pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman bahan bangunan rumah adat serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya; **P2** = Kegiatan budidaya tanaman pada tapak lahan di dalam areal TN haruslah yang mampu menopang kebutuhan bahan baku dan menunjang pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman kuliner lokal dan tanaman obat-obatan tradisional; **P3** = Kegiatan budidaya tanaman pada tapak lahan di dalam areal TN haruslah yang mampu menopang kebutuhan bahan baku dan menunjang pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman bahan peralatan dan perlengkapan pakaian adat/ tradisional; **P4** = Kegiatan budidaya tanaman di TN haruslah yang mampu menopang kebutuhan bahan baku dan menunjang pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman bahan permainan dan kesenian tradisional lainnya; **P5** = Kegiatan budidaya tanaman pada tapak lahan di dalam areal TN haruslah yang mampu menopang kebutuhan bahan baku dan menunjang pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman bahan baku ritual budaya dan berbagai kegiatan sosial religi lainnya; **P6** = Tapak lahan di dalam areal TN yang dikelola harus mampu menjadi habitat bagi keberadaan dan pergerakan satwa liar endemik; **P7** = Tapak lahan di dalam areal TN yang dikelola harus mampu menjadi ruang percontohan bagi berbagai interaksi dan ketergantungan masyarakat lokal terhadap ekosistem hutan.
- b) **Skala penilaian:** 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = agak tidak setuju, 4 = biasa saja, 5 = agak setuju, 6 = setuju, 7 = sangat setuju.

Gambar 4. Persepsi Stakeholders tentang distribusi manfaat budaya

Dalam berbagai kriteria terkait distribusi manfaat budaya, hasil penelitian membuktikan skor rata-rata antara *stakeholders* adalah 5 (agak tinggi). Nilai ini membuktikan bahwa *stakeholders* memiliki persepsi yang mengarah pada pentingnya pengembangan tapak yang mampu menopang sistem budaya masyarakat di sekitar TNTN. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa $p\text{-value} = 0,429 < \alpha=5\%$ atau terima H1, yang artinya persepsi *stakeholders* tentang distribusi manfaat budaya dalam pembangunan TNTN adalah tidak sama atau terdapat perbedaan signifikan. Dalam konteks agroekologi, Goulart *et al.* (2012) menghimbau bahwa heterogenitas masyarakat dan para pihak lainnya adalah *key concept* dalam mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan, karena selain ruang lahan (agroekologi) memiliki berbagai fungsi biologis dan ekologis, maka nilai manfaat sosial-budaya lainnya yang didapatkan ialah pemanfaatan kearifan lokal dalam berbagai praktek pertanian. Falah (2013); Setiawan dan Qiptiyah (2014) mengingatkan pelibatan masyarakat adat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang juga diharapkan dapat menjaga kelestarian kawasan hutan.

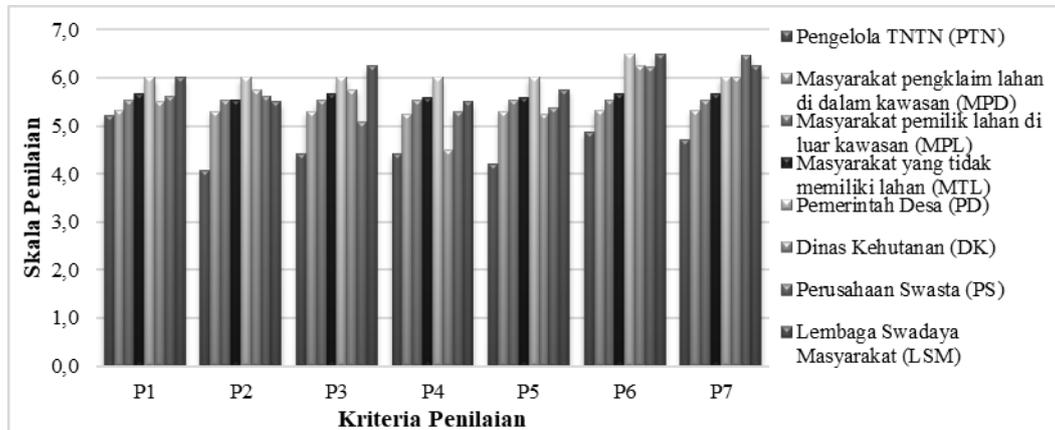
5. Persepsi Stakeholders tentang Distribusi Manfaat Ekonomi

Persepsi *stakeholders* tentang distribusi manfaat ekonomi adalah disusun dan dikembangkan berdasarkan pengaturan berbagai elemen sumberdaya ekowisata di TNTN yang mampu memberikan nilai tambah penghasilan dan menunjang perluasan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar TNTN. Adapun persepsi *stakeholders* tentang distribusi manfaat ekonomi dalam pembangunan TNTN dapat dilihat pada Gambar 5.

Dalam berbagai kriteria terkait distribusi manfaat ekonomi, hasil penelitian membuktikan skor rata-rata antara *stakeholders* adalah 5 (agak tinggi). Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa $p\text{-value} = 0,429 < \alpha = 5\%$ atau terima H1, yang artinya persepsi antara *stakeholders* tentang distribusi manfaat ekonomi dalam pembangunan TNTN adalah tidak sama atau terdapat perbedaan signifikan. Nilai ini membuktikan bahwa *stakeholders* memiliki persepsi yang mengarah pada pentingnya pengembangan sumberdaya ekowisata di TNTN yang mampu menciptakan dan menunjang pendapatan masyarakat. Drumm dan Moore (2002) menyatakan bahwa selain ekowisata dinilai mampu meminimalkan dampak ekologis, manfaat lainnya yang

didapatkan ialah mampu memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal; sebagaimana "true story" keberhasilan pembangunan ekowisata mampu mendanai program konservasi di

berbagai daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Stronza dan Durham (2008) mengestimasi bahwa ekowisata global telah menghasilkan pendapatan sebesar 300\$ miliar US per tahun.



Keterangan:

- a) **P1**= Pemanfaatan tapak lahan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekowisata harus mampu membuka lapangan kerja yang menunjang penghasilan masyarakat; **P2** = Pemanfaatan tapak lahan di dalam areal TN untuk pembangunan berbagai jenis kegiatan ekowisata harus mampu membuka lapangan kerja yang menunjang penghasilan masyarakat; **P3** = Pemanfaatan tanaman untuk penyediaan berbagai produk cendramata bagi wisatawan harus mampu membuka lapangan kerja yang menunjang penghasilan masyarakat; **P4** = Pemanfaatan tanaman untuk budidaya tanaman hias harus mampu membuka lapangan kerja yang menunjang penghasilan masyarakat; **P5** = Pemanfaatan tanaman untuk budidaya tanaman obat-obatan harus mampu membuka lapangan kerja yang menunjang penghasilan masyarakat; **P6** = Pemanfaatan berbagai fauna untuk budidaya lebah madu dan domestikasi fauna lainnya harus mampu membuka lapangan kerja yang menunjang penghasilan masyarakat; **P7** = Pemanfaatan berbagai satwa liar endemik melalui pembinaan habitat gajah dan satwa liar endemik lainnya harus mampu membuka lapangan kerja yang menunjang penghasilan masyarakat.
- b) **Skala penilaian:** 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = agak tidak setuju, 4 = biasa saja, 5 = agak setuju, 6 = setuju, 7 = sangat setuju.

Gambar 5. Persepsi Stakeholders tentang distribusi manfaat ekonomi

Keseriusan masyarakat untuk mengembangkan ekowisata di TNTN dibuktikan dengan laporan secara langsung kepada pihak Balai TNTN untuk melakukan kunjungan dan survei potensi sebagai bentuk studi awal. Gunawan (2017) menyatakan bahwa adanya kemauan yang kuat dari masyarakat Desa Bagan Limau untuk mengembangkan wisata buru di TNTN karena dinilai mampu memberikan berbagai manfaat untuk semua pihak. Secara empiris, Desriani *et al.* (2017) melaporkan total pemasukan dari nilai *Willingnes to Pay* (WTP) untuk Pemerintah Kecamatan Ukui di kawasan TNTN adalah sebesar Rp. 729.424 /bulan dan jumlah yang didapat tersebut akan meningkat pada hari libur.

SIMPULAN

1. Dinamika pembangunan kawasan hutan di TNTN dicirikan oleh besarnya kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada beragamnya karakteristik dan orientasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan pembangunan TNTN.
2. Persepsi *stakeholders* tentang konsep pengembangan TNTN berdasarkan aspek keabsahan lahan, rencana baru pengelolaan, distribusi manfaat ekologi,

manfaat budaya dan manfaat ekonomi adalah agak baik (skor 5). Hal ini memberikan makna bahwa konsep pengembangan TNTN adalah bernilai agak efektif dan efisien untuk diimplementasikan dalam pembangunan ekosistem hutan di TNTN. Uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa $p\text{-value} = 0,429 < \alpha = 5\%$ atau terima H_1 , yang artinya persepsi *stakeholders* dalam pembangunan ekosistem hutan di TNTN adalah tidak sama atau terdapat perbedaan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Altinay L, Paraskevas A. 2008. *Planning Research in Hospitality and Tourism*. Burlington: (US): Butterworth-Heinemann.

Avenzora R. 2008. *Ekoturisme - Teori dan Praktek*. Aceh (ID): BRR NAD-Nias.

[BTNTN] Balai Taman Nasional Tesso Nilo. 2015. *Zonasi Taman Nasional Tesso Nilo*. Riau (ID): Tidak dipublikasikan.

[BTNTN] Balai Taman Nasional Tesso Nilo. 2016. *Data Statistik TNTN 2015*. Riau (ID): BTNTN.

- [BTNTN] Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia Riau Program. 2010. *Kondisi dan Usulan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo 2010 dan Ringkasan Eksekutif: Tipologi dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo*. Riau (ID): BTNTN & WWF Indonesia.
- Desmiwati, Surati. 2017. Upaya penyelesaian masalah pemantapan kawasan hutan pada taman nasional di Pulau Sumatera. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 6(2): 135-146.
- Desriani J, Putro ST, Iyan YR. 2017. Nilai ekonomi ekowisata Taman Nasional Tesso Nilo dengan pendekatan metode *contingent valuation* di Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan. *JOM FEKON*. 4(1): 1175-1189.
- Drumm A, Moore A. 2002. *Ecotourism Development: a Manual for Conservation Planners and Managers*. Arlington, Virgia (US): The Nature Conservancy.
- Falah F. 2013. Kajian efektivitas pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Kutai. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 10(1): 37-57.
- Goulart FF, Jacobson TKB, Zimbres BQC, Machado RB, Aguiar LMS, Fernandes GW. 2012. Agricultural systems and the conservation of biodiversity and ecosystems in the tropics. In Lameed AG, editor. *Biodiversity Conservation and Utilization in a Diverse World*. Rijeka (HR): InTech.
- Gunawan A. 2017. Pengembangan destinasi wisata baru di Taman Nasional Tesso Nilo sangat diperlukan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; KSDAE. [Internet]. [diunduh 16 Januari 2018]. Tersedia pada: <http://ksdae.menlhk.go.id/info/1422/pengembangan-destinasi-wisata-baru-di-tn-tesso-nilo-sangat-diperlukan.html>
- Kahfi F. 2015. Pengelolaan lingkungan melalui ekowisata berbasis masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo-Riau [Internet]. [diunduh 16 Januari 2018]. Tersedia pada: <http://repository.unpad.ac.id/21456/>
- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.255/ Menhut-II/2004 Perubahan Fungsi tentang Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang Terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas 38.576 Hektar Menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.663/ Menhut-II/2009 Perubahan Fungsi tentang Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 ha di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Menjadi Taman Nasional sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo untuk Penambahan Luas Kawasan 44.492 ha.
- [Permenhut] Peraturan Menteri Kehutanan. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.
- Setiawan H, Qiptiyah M. 2014. Kajian etnobotani masyarakat adat Suku Moronene di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 3(2): 107-117.
- Stronza A, Durham W. 2008. *Ecotourism and Conservation in the Americas*. Wallingford (US): CAB International.
- Suwarno E, Situmorang AW. 2017. Identifikasi hambatan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau. *Analisis Kebijakan Kehutanan*. 14(1):17-30.
- Wakka AK. 2014. Analisis stakeholders pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 3(1): 47-55
- Yoserizal, Almahera. 2016. Studi investigasi perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau Indonesia. *Prosiding Seminar Serantau Pengurusan Perserikatan*.